

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH PELABA
PURA DI BALI (INKONSISTENSI NORMA DALAM PASAL 3 UNDANG-
UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 DAN PASAL 1 PERATURAN
PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1963 TENTANG BADAN-BADAN
HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK TANAH**

Oleh : Putu Dipa Satria Dana
1714101045

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa kedudukan SPPT dalam hal pendaftaran tanah pelaba pura, serta (2) mengetahui dan menganalisa kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah pelaba pura dengan adanya pertentangan antara hak ulayat dengan PP No. 38 Tahun 1963. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang menganalisa mengenai konflik norma antara UUPA dan PP No. 38 Tahun 1963. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dan metode analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan SPPT dalam hal pendaftaran tanah tidak bisa menjadi bukti yang kuat karena pengurusan sertipikat tanah pelaba pura tidak jauh berbeda dengan pendaftaran tanah perseorangan dimana mengharuskan adanya berita acara rapat adat yang berisi kesepakatan pengempon. Serta, (2) Kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura dengan berlakunya hak ulayat dalam hukum agrarian nasional dengan adanya Pasal II Ayat 1 ketentuan konvensi UUPA yang kemudian dikeluarkan PP No. 38 Tahun 1963 dan lahirnya UUPA, kemudian dikeluarkan PP No. 38 Tahun 1963 dan lahirnya KEPMENDAGRI No SK/556/DJA/1986 tentang pura mempunyai hak milik atas tanah, sehingga dengan adanya aturan di atas memperkuat desa adat dalam mempertahankan keberadaan tanah pelaba pura.

Kata Kunci : Tanah Pelaba Pura, Pendaftaran Tanah, SPPT

***LEGAL CERTAINTY OF PROPERTY RIGHTS ON PELABA PURA LAND
IN BALI (INCONSISTENCY OF NORMS IN ARTICLE 3 OF LAW NO. 5 OF
1960 AND ARTICLE 1 OF GOVERNMENT REGULATION NO. 38 OF 1963
CONCERNING LEGAL ENTITIES THAT CAN OWN LAND OWNERSHIP)***

Oleh : Putu Dipa Satria Dana

1714101045

ABSTRACT

This study aims to (1) find out and analyze the position of SPPT in terms of land registration of pelaba pura, and (2) find out and analyze legal certainty regarding property rights on land of pelaba pura with the conflict between ulayat rights and PP no. 38 of 1963. The type of research used in normative legal research which analyzes the conflict of norms between UUPA and PP. 38 of 1963. The approach used in this research is a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials with the technique of collecting legal materials by tracing statutory regulations and other positive legal sources and data analysis methods using qualitative analysis methods. The results show that (1) the position of the SPPT in terms of land registration cannot be strong evidence because the management of a pelaba pura land certificate is not much different from an individual land registration which requires the existence of minutes of customary meetings containing the agreement of the owner. And, (2) legal certainty of the ownership of the pelaba pura land with the enactment of ulayat rights in national agrarian law with the existence of Article II Paragraph 1 of the provisions of the UUPA convention which was later issued by PP. 38 of 1963 and the birth of the UUPA, then PP No. 38 of 1963 and the birth of the Ministry of Home Affairs Decree No. SK/556/DJA/1986 regarding temples having property rights to land, so that the existence of the above rules strengthens the traditional village in maintaining the existence of the pelaba pura land.

Keyword : Pelaba Pura Land, Land Registration, SPP